



Jalanan Pasti Makin Macet

■ Penutupan Perlintasan Kereta Api Lempuyangan Perlu Dikaji

Kalau mau ditutup harus ada solusinya dulu. Misalnya, apakah akan menambah jembatan layang
Suwarto

YOGYA, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta akan berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana penutupan perlintasan kereta api (KA) sebidang di bawah flyover Lempuyangan.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto mengatakan, pada Selasa mendatang pihaknya bersama Pemkot Yogyakarta, akan mendatangi langsung

Kemenhub untuk kepastian penutupan perlintasan tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang ingin menutup seluruh perlintasan KA sebidang perlu pengkajian terlebih dahulu.

"Kalau mau ditutup harus ada solusinya dulu. Misalnya,

ke halaman 14

Pro-kontra Penutupan Perlintasan KA

- Rencana Kemenhub menutup perlintasan KA Lempuyangan masih belum disepakati Pemkot Yogya.
- Pasalnya, belum ada solusi konkret jika nantinya akan ditutup.
- Risiko kemacetan lalu lintas di wilayah itu sudah membayangi, lantaran kedatangan saat ini sudah sangat parah.

Apalagi flyover Lempuyangan tak didesain untuk kendaraan alutsis di atasnya, padahal potensi kemacetan di atas jembatan sangat tinggi.

- Pemkot bersama DPRD Yogya akan berkonsultasi mengenai hal ini kepada Kemenhub pekan depan.

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

Jalanan Pasti

• Sambungan Hal 13

apakah akan menambah jembatan layang. Kalau iya seperti itu, kita mengusulkan pakai APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Karenanya, nanti konsultasi juga akan bersama pihak eksekutif, yakni Dishub dan PUP (Pekerjaan Umum dan Perumahan)," ujar Suwarto, Jumat (15/9).

Ia mengatakan, DPRD Kota Yogyakarta sebenarnya keberatan bila perlintasan KA tersebut ditutup. Pasalnya, hal itu akan berdampak signifikan pada lalu lintas dan lainnya yang terkait.

"Tidak ditutup saja (jalan) sudah macet, apalagi kalau perlintasan (KA) ditutup. Ada risiko kemacetan yang tinggi dan sisi keamanan dari pengguna jalan," ungkapnya.

Ia menilai pemerintah pusat membuat kebijakan tidak melihat kondisi di daerah. Kebijakan penutupan perlintasan KA sebidang

tersebut dinilai tidak melihat kearifan lokalnya. Diharapkan, pemerintah pusat harus melakukan kajian di Lempuyangan sebelum meminta Pemkot Yogyakarta untuk menutupnya akhir tahun ini.

Suwarto menambahkan, rencana penutupan yang hendak dilakukan oleh Kemenhub mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Namun dalam PP tersebut juga dituangkan jika penutupan perlintasan KA sebidang harus mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.

"Makanya, kalau nanti (perlintasan KA) ditutup terus aksesibilitas masyarakat terganggu, berarti kan bukan solusi," pungkasnya.

Harapkan solusi

Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo juga akan ikut berkonsultasi ke Kemenhub terkait surat kementerian soal penutupan perlintasan sebidang. Dia berharap ada titik temu atau solusi

dari kebijakan pusat tersebut.

"Kita melihat simpang ini berat sekali, flyover Lempuyangan bukan untuk kendaraan statis, karena itu kita akan bersama anggota Dewan berkonsultasi langsung dengan Dirjen Perkeretaapian," ujar Wirawan, Jumat (15/9).

Selain itu, bila memungkinkan dilakukan pembangunan flyover tambahan atau lanjutan, konsultasi juga akan membawa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum.

Wirawan menjelaskan, flyover Lempuyangan tidak dibangun untuk kendaraan statis. Dirinya pun khawatir jika perlintasan di bawah jembatan akhirnya ditutup dan terjadi lonjakan kendaraan yang melintas di atas jembatan.

"Lonjakan kendaraan akan berdampak pada penumpukan kendaraan. Jika di atas jembatan kemudian stagnan tidak bisa bergerak, ini tentu membahayakan jembatan itu sendiri. Kon-

disi semacam ini yang ingin kami sampaikan ke Kemenhub," jelas Wirawan.

Selain itu, lalu lintas di sekitar Lempuyangan selama ini sudah cukup padat. Ruas jalan di kawasan tersebut juga tidak mungkin lagi untuk diperlebar. Sehingga, manajemen rekayasa lalu lintas tidak akan berpengaruh signifikan untuk mengurangi kepadatan arus ketika perlintasan KA ditutup.

Kemenhub menargetkan hingga tahun 2018 akan menutup seluruh perlintasan KA di bawah jalan layang atau flyover. Akhir tahun ini akan dilakukan uji coba penutupan perlintasan KA di Lempuyangan, Janti, dan Sentolo Kulonprogo.

Kebijakan tersebut mengacu pada PP nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 56 tahun 2009 tentang perkeretaapian. Dalam pasal 79 disebutkan, perlintasan sebidang bisa ditutup apabila tanpa izin atau dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan. (gil)

Penutupan Perlintasan Tetap Dilakukan



TRIBUN JOGJA/HENING WASISTO

LALU LINTAS - Kondisi lalu lintas di bawah flyover Lempuyangan, belum lama ini. Rencana penutupan perlintasan KA Lempuyangan masih menimbulkan polemik hingga kini.

PT KAI Daerah Operasional (Daop) 6 Yogyakarta masih akan menunggu Kementerian Perhubungan terkait penutupan perlintasan kereta api (KA) sebidang di bawah flyover Lempuyangan.

"Nanti dari pihak Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub masih akan rapat terlebih dahulu dengan Wali Kota Yogyakarta," urai Deputy Executive Vice President PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Ida Hidayat, Jumat (15/9).

Ia mengatakan, kebijakan penutupan tetap akan dilaksanakan.

● ke halaman 14

Penutupan Perlintasan

● Sambungan Hal 13

Dalam waktu dekat sesuai jadwal perencanaan, maka yang akan ditutup pertama adalah perlintasan di Sentolo Kulonprogo pada akhir Oktober mendatang, lalu perlintasan flyover Janti, dan terakhir perlintasan Lempuyangan.

Ia menegaskan, bahwa secara undang-undang perlintasan sebidang dibawah flyover harus ditutup dengan alasan utama adalah keselamatan dan kelancaran transportasi perkeretaapian. Namun yang akan menutup

bukan dari PT KAI, melainkan pemerintah daerah setempat, sesuai instruksi dalam PP nomor 6 tahun 2017.

"Kalau dari KAI kami hanya bantu sosialisasi dan proses penutupan yang dilakukan oleh Pemda. Misalnya kita sediakan rel bekas, tenaga, atau keperluan lainnya," ungkap Ida.

Ida optimistis, seluruh perlintasan sebidang di DIY bisa ditutup sesuai target yang ditetapkan oleh Kemenhub. PT KAI Daop 6 akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dishub, dan kepolisian untuk menemukan solusi atau jalan alternatif jika perlintasan telah ditutup.

"Kami akan bekerja sama

agar bagaimana melakukan sesuatu tapi tidak menimbulkan masalah baru. Kalau bisa ditutup, langsung ditutup, kalau tidak bisa, kita carikan jalan kemana, APILL-nya kemana, itu harus optimis bisa," ungkapnya.

Pengurangan perlintasan sebidang dilakukan bertahap dengan target di tahun 2022 menutup pada jalan nasional, tahun 2027 di jalan provinsi, hingga tahun 2032 untuk seluruh perlintasan di jalan kabupaten-kota.

Sementara itu, di tahun 2018 perlintasan dibawah jalan layang akan ditutup seluruhnya. Kemenhub sendiri telah menutup beberapa perlintasan sebidang di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. (gii)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005